

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun program-program pada BPKAD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

A. Program – Kegiatan Lokalitas Kewenangan BPKAD

Merupakan gambaran program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD dalam waktu 2016 - 2021. Program/ Kegiatan tersebut meliputi :

Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.
12. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
13. Peringatan hari besar nasional
14. Pameran pembangunan
15. Kegiatan koordinasi dan kegiatan pembinaan kedalam daerah.
16. Pengelola administrasi keuangan belanja subsidi, bantuan keuangan (bansos).
17. Jasa pendukung operasional dan keamanan perkantoran.

18. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan meubeleur.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
8. Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor.
9. Pengadaan perangkat komputer dan printer.
10. Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
5. Penyusunan LAKIP.
6. Pengelola Administrasi SKPD dan PPKD.
7. Penyusunan Renstra

Program Peningkatan dan pengembangnya Pengelola keuangan daerah

1. Penyusunan standar satuan harga.
2. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
3. Sosialisasi tentang penghapusan piutang daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi.
5. Penatausahaan piutang daerah.
6. Pendampingan Pengelola keuangan BLUD dan puskesmas

7. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
8. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
9. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
10. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
11. Penyusunan rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
12. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
13. Penilaian dan inventarisasi aset / BMD
14. Rekonsiliasi penerimaan daerah.
15. Penyusunan status penggunaan aset / BMD
16. Penyusunan petunjuk teknis Pengelola keuangan.
17. Penatausahaan Barang Milik Daerah
18. Penyusunan laporan semester I SKPD.
19. Verifikasi dan klarifikasi data aset.
20. Penyusunan pelaporan realisasi pendapatan daerah.
21. Pengamanan dan pengendalian aset / BMD.
22. Penyusunan Raperda tentang Barang Milik Daerah.
23. Pemeliharaan/pengembangan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil.
24. Kegiatan Pengelola pembiayaan daerah.
25. Penyusunan standar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
26. Penyusunan standar perjalanan dinas
27. Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA).
28. Penyusunan rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
29. Pendampingan dan bimbingan Pengelola keuangan SKPD.
30. Pemindahtanganan aset/BMD
31. Rekonsiliasi laporan pengadaan BMD
32. Sosialisasi Modul Penerimaan Negara Generasi Dua (MPN-G2)
33. Sosialisasi dana jaminan kesehatan nasional BPJS
34. Penyusunan anggaran kas.
35. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD)
36. Monitoring dan evaluasi Pengelola administrasi/fisik BMD
37. Penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan aset/BMD.

38. Pemeliharaan SIKD client (agen SIKD)
39. Penyusunan standar satuan biaya.
40. Kegiatan Pengelola kas daerah.
41. Pengelola administrasi SPD dan SP2D.
42. Balik nama sertifikat
43. Penyusunan Analisa Standar Belanja.
44. Pembinaan administrasi BMD.
45. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017.
46. Penyusunan analisa laporan keuangan daerah.
47. Rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana dari provinsi.
48. Pengelola administrasi penggajian PNS Kabupaten Sintang.
49. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai pedoman pengadaan dan pemeliharaan BMD.
50. Pembangunan portal BPKAD (Website)
51. Pengelola dan evaluasi dana penyesuaian DAK.
52. Penyusunan juknis pengembalian penerimaan daerah pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
53. Penyusunan laporan BMD.
54. Penyusunan standar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk kegiatan konsultasi.
55. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun 2017.
56. Penyusunan Raperda tentang Pengelola Keuangan Daerah.

B. Program dan kegiatan lintas SKPD

Merupakan program dan kegiatan yang di laksanakan melibatkan SKPD lain. Dari Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2016-2021 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD seperti dibawah ini :

Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Renstra

Program Peningkatan dan pengembangnya Pengelola keuangan daerah

1. Penyusunan standar satuan harga.
2. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
3. Sosialisasi tentang penghapusan piutang daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi.
5. Penatausahaan piutang daerah.
6. Pendampingan Pengelola keuangan BLUD dan puskesmas
7. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
8. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
9. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
10. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
11. Penyusunan rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
12. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
13. Penilaian dan inventarisasi aset / BMD
14. Rekonsiliasi penerimaan daerah.
15. Penyusunan status penggunaan aset / BMD
16. Penyusunan petunjuk teknis Pengelola keuangan.
17. Penatausahaan Barang Milik Daerah
18. Penyusunan laporan semeser I SKPD.
19. Verifikasi dan klarifikasi data aset.
20. Penyusunan pelaporan realisasi pendapatan daerah.
21. Pengamanan dan pengendalian aset / BMD.
22. Penyusunan Raperda tentang Barang Milik Daerah.
23. Pemeliharaan/pengembangan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil.
24. Kegiatan Pengelola pembiayaan daerah.
25. Penyusunan standar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
26. Penyusunan standar perjalanan dinas
27. Penyusunan rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
28. Pendampingan dan bimbingan Pengelola keuangan SKPD.
29. Pemindahtanganan aset/BMD
30. Rekonsiliasi laporan pengadaan BMD

31. Sosialisasi Modul Penerimaan Negara Generasi Dua (MPN-G2)
32. Sosialisasi dana jaminan kesehatan nasional BPJS
33. Penyusunan anggaran kas.
34. Monitoring dan evaluasi Pengelola administrasi/fisik BMD
35. Penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan aset/BMD.
36. Penyusunan standar satuan biaya.
37. Kegiatan Pengelola kas daerah.
38. Pengelola administrasi SPD dan SP2D.
39. Balik nama sertifikat
40. Penyusunan Analisa Standar Belanja.
41. Pembinaan administrasi BMD.
42. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017.
43. Penyusunan analisa laporan keuangan daerah.
44. Rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana dari provinsi.
45. Pengelola administrasi penggajian PNS Kabupaten Sintang.
46. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai pedoman pengadaan dan pemeliharaan BMD.
47. Pengelola dan evaluasi dana penyesuaian DAK.
48. Penyusunan juknis pengembalian penerimaan daerah pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
49. Penyusunan standar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk kegiatan konsultasi.
50. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun 2017.
51. Penyusunan Raperda tentang Pengelola Keuangan Daerah.

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator BPKAD

Indikator kinerja dan pendanaan indikator BPKAD Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini: